

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN
KEUANGAN**

(STUDI KASUS DI BKD SUKOHARJO)



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Tugas-Tugas dan Syarat-Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi Program Studi S1 Akuntansi**

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta

Disusun Oleh :

Pramesti Arum Sari

NIM : 15.31.0115

PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI

SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI SURAKARTA

TAHUN 2022

PENGESAHAN PEMBIMBING

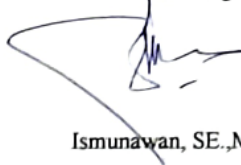
Nama : Pramesti Arum Sari
NIM : 15.31.0115
Progam Studi : S1 Akuntansi
Judul : Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan
(Studi Kasus di BKD Sukoharjo)

Disetujui dan disahkan.

Hari :

Tanggal :

Pembimbing



Ismunawan, SE., M.Si

Mengetahui

Kepala Program Studi S1



Astuning-Saharsini, S.E., M.Acc

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Pramesti Arum Sari
NIM : 15.31.0115
Program Studi : S1 Akuntansi
Judul : Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan
(Studi Kasus di BKD Sukoharjo)

Dengan ini telah diuji dan dipertahankan dihadapan tim penguji Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta (STIE Surakarta) dan diterima untuk memenuhi persyaratan gelar Sarjana Akuntansi

Pada Hari : Selasa
Tanggal : 15 November 2022

Tim Penguji

Ketua : Dr. Pardi, S.E.,M.M.,M.H
Anggota : Ismunawan, SE.,M.Si

Tanda Tangan

()

()

Mengetahui

Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta



Dr. Budi Istianto, S.E.,M.M.,M.H

PERNYATAAN

Yang bersangkutan dibawah ini :

Nama : Pramesti Arum Sari

NIM : 15.31.0115

Program Studi : S1 Akuntansi

Judul : Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan
(Studi Kasus di BKD Sukoharjo)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah benar-benar hasil karya sendiri. Apabila ternyata dikemudian hari ditemukan bahwa skripsi saya hasil plagiat dari karya orang lain, maka saya bersedia membatalkan/menanggalkan gelar kesarjanaan saya atau saya bersedia diberikan sanksi sesuai dengan perundangan yang berlaku.

Pembuat Pernyataan



Pramesti Arum Sari

MOTTO

”Jangan biarkan opini orang lain menenggalamkan suara dalam dirimu”

(Steve Jobs)

“Mulailah setiap hari dengan pikiran positif dan hati yang bersyukur

(Roy T. Bennet)

PERSEMBAHAN

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Agung dan Maha Tinggi. Atas takdirmu saya bisa menjadi pribadi yang berpikir, berilmu, dan bersabar. Semoga keberhasilan ini menjadi salah satu langkah awal untuk masa depan.

Denga ini penulis persembahkan skripsi ini untuk:

- Bapak dan Ibu tercinta atas dukungan dan nasehat yang diberikan serta doa yang tidak pernah jemu dipanjatkan.
- Segenap keluarga, yang telah memberikan semangat.
- Serta para teman dan sahabat yang tidak pernah berhenti memberi semangat serta dukungan.

KATA PENGANTAR

Assamu'alaikum Wr.Wb

Penulis mengucapkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan (Studi Kasus di BKD Sukoharjo”** dengan baik dan lancar. Penulisan skripsi dilakukan guna memenuhi syarat dalam pencapaian gelar Sarjana 1 (S1) pada Program Studi Akuntansi, di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.

Penyusunan skripsi ini dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak, Dr.Budi Istianto, S.E.,M,M.,M,H selaku Ketua Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.
2. Ibu Astuning Saharsini, SE.,M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi
3. Bapak Ismunawan, SE.,M.Si selaku Pembimbing 1 yang selalu bijaksana dalam memberikan bimbingan, nasehat serta meluangkan waktunya selama penelitian dan penulisan skripsi ini.
4. Ibu Wijayanti selaku Sekretariat Badan Keuangan Daerah Sukoharjo yang senantiasa mengarahkan peneliti selama melakukan penelitian di Badan Daerah Sukoharjo.

5. Pegawai Badan Keuangan Sukoharjo yang telah bersedia meluangkan waktu guna mengisi kuisisioner.
6. Bapak dan Ibu dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta yang memberikan bekal ilmu pengetahuan.
7. Kedua Orang Tua yang tercinta untuk semua doa dan baik secara moral, spiritual serta motivasi selama proses penulisan.
8. Teman-teman dan semua pihak yang membantu dalam penulisan yang tidak bisa disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih membutuhkan saran dari pembaca. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari pembaca, sehingga penulis selanjutnya dapat menjadi lebih baik. Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, September 2022

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTARCK.....	xv
BAB 1 : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	7
A. Landasan Teori.....	7
B. Penelitian terdahulu.....	27
C. Kerangka Pemikiran.....	31
D. Hipotesis.....	32

BAB III : METODE PENELITIAN.....	36
A. Objek Penelitian.....	36
B. Jenis dan Sumber Data.....	36
C. Populasi dan Sampel.....	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	47
E. Definisi Operasional.....	47
F. Teknik Analisis.....	50
BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....	56
A. Identitas Responden.....	56
B. Analisis Data.....	58
C. Pembahasan.....	69
BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	72

Daftar Pustaka

Lampiran

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1. Menyajikan Pengklasifikasikan <i>IC</i>	14
Tabel 2. Penelitian Terdahulu.....	27
Tabel 3. Identitas Responden.....	37
Tabel 4. Operasional Variabel.....	39
Tabel 5. Definisi Operasional.....	48
Tabel 6. Data Responden berdasarkan umur.....	56
Tabel 7. Data Responden berdasarkan jenis kelamin.....	56
Tabel 8. Data Responden berdasarkan pendidikan.....	57
Tabel 9. Hasil Uji statistic diskriptif variable.....	58
Tabel 10. Hasil Uji Validitas.....	59
Tabel 11. Hasil Uji Reabilitas.....	62
Tabel 12. Hasil Uji Normalitas.....	62
Tabel 13. Hasil Uji Heterokedastisitas.....	64
Tabel 14. Hasil Uji Multikolonieritas.....	64
Tabel 15. Hasil Uji F.....	65
Tabel 16. Hasil Uji T.....	66
Tabel 17. Hasil Koefisien Determinasi.....	68

DAFTAR GAMBAR4

	Halaman
Gambar 1 Kerangka Pemikiran.....	36
Gambar 2 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	63

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Identitas Responden
- Lampiran 2 Tabulasi Data
- Lampiran 3 Hasil Statistik Deskriptif
- Lampiran 4 Hasil Uji Validitas
- Lampiran 5 Hasil Uji Reabilitas
- Lampiran 6 Hasil Uji Normalitas
- Lampiran 7 Hasil Uji Heterokedastisitas
- Lampiran 8 Hasil Uji Multikolinieritas
- Lampiran 9 Hasil Uji F
- Lampiran 10 Hasil Uji t
- Lampiran 11 Hasil Analisis Koefisien
- Lampiran 12 Kuisisioner
- Lampiran 13 Surat Ijin Penelitian

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengetahui factor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan variabel *Intellectual Capital*. Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintah, Pengendalian Intern, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komitmen Organisasi terhadap BKD Sukoharjo. Data diperoleh melalui penyebaran kuisioner kepada 55 pegawai BKD Sukoharjo, Sampel diambil dengan teknik *purposive sampling*. Data dianalisa menggunakan program SPSS versi 26 dan uji hipotesis menggunakan analisis regresi berganda.

Hasil penelitian ini menunjukan secara parsial *Intellectual Capital*, Pemahaman Akuntansi Pemerintah dan Komitmen Organisasi berpengaruh kepada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sementara Pengendalian Intern dan Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Kata kunci : kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, *Intellectual Capital*, pemahaman sistem akuntansi pemerintah, pengendalian intern, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi.

ABSTRACT

This study aims to determine the factors that influence the quality of local government financial report. This study uses the variables of Intellectual Capital, Understanding of Government Accounting System, Internal Control, Utilization of Information Technology and Organizational Commitment to BKD Sukoharjo. The data was obtained by distributing questionnaires to 55 BKD Sukoharjo employees. The sample was taken by purposive sampling technique. Data were analysed using SPSS version 26 program and un-hypothesis used using multiple regression analysis.

The result show that Intellectual Capital, Understanding of Government, Accounting System, Organizational Commitment affect the quality of local government financial report, while Internal Control, Utilization of Information Technology have no effect on the quality of local government financial report.

Keywords :Quality of local government financial report, Intellectual Capital, Understanding of Government Accounting System, Internal Control, Utilization of Information Technology, Organizational Commitment.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sektor public di Indonesia sekarang ini sedang berkembang pesat, ditandai dengan adanya tuntutan publik akan akuntabilitas pada instansi pemerintah baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai bentuk pertanggungjawaban keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan atas aktivitas dan kinerja instansi pemerintah dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

Intansi pemerintah selaku pengelola dana public harus mampu memberikan pertanggungjawaban untuk menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan juga kegiatannya kepada public. Pertanggungjawaban ini berupa laporan keuangan atas pengelolaan dana yang telah digunakan. Laporan keuangan disusun untuk memberikan gambaran informasi tentang harta, utang dan modal yang telah terjadi dalam instansi pemerintah atas dana public yang telah digunakan . hal tersebut dimaksudkan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan pada instansi pemerintah telah berjalan dengan baik.

Pemerintah daerah sebagai salah satu instansi pemerintahan mempunyai kewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang nantinya akan digunakan oleh pengguna laporan keuangan, yang berguna dalam proses pertimbangan keputusan, baik keputusan ekonomi, sosial, budaya maupun politik. Oleh karena itu informasi akuntansi yang terdapat di dalam laporan keuangan pemerintah daerah harus bermanfaat dan memenuhi karakteristik kualitatif laporan keuangan sebagaimana yang disyaratkan dalam peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua.

Laporan keuangan adalah hasil dari proses yang menyajikan

Informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan oleh berbagai pihak yang berkepentingan. (Bastian,2010:9). Laporan keuangan berkualitas harus memenuhi beberapa kriteria dalam akuntansi pemerintah relevan, andal, dapat dipahami dan dapat dibandingkan. Jika kriteria dalam akuntansi pemerintah terpenuhi, maka pemerintah daerah mampu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk pengelolaan keuangan tahun anggaran 2021 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Opini WTP ke tujuh berturut-turut yang diraih Sukoharjo sejak Tahun 2015 silam. Bupati Sukoharjo, Etik Suryani mengatakan, opini WTP yang diterima Sukoharjo pada Pekan lalu di Semarang merupakan penilaian BPK untuk pengelolaan anggaran Tahun 2021. Sebagai bukti pengelolaan anggaran oleh daerah sesuai dengan kaidah-kaidah standar akuntansi pemerintah (SAP) yang transparan dan akuntabel."Opini WTP menjadi pemacu daerah terus berkomitmen mewujudkan 'clean and good governance' sebagaimana amanat reformasi birokrasi pemerintah pusat," kata Etik seperti dilaporkan *Kontributor Elshinta, Deni Suryanti*, Selasa (24/5). Apa yang diraih Sukoharjo, lanjut Etik, juga menjadi cambuk bagi pemerintah daerah bersama-sama dengan seluruh aparatur sipil negara (ASN), menjaga integritas dan memberikan laporan pertanggungjawaban penggunaan uang negara lebih berkualitas. Sedangkan, Kepala Perwakilan BPK Jawa Tengah, Ayub Amali menegaskan, bahwa standar pemeriksaan keuangan mengikuti pengujian bukti yang mendukung angka dan pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah. "Tujuannya guna menilai kewajaran penyajian saldo akun, informasi keuangan, konsistensi prinsip akuntansi, efektivitas sistem pengendalian intern dan kepatuhan aturan perundang-undangan," tandasnya.

Fenomena yang terjadi belakangan ini banyak Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi masih terjadi kecurangan didalamnya. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mendorong seluruh kementerian/lembaga serta pemerintah daerah untuk

tidak cepat puas dengan raihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari hasil audit laporan keuangan mereka oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Kenyataannya, meski mendapat status WTP, masih banyak kepala daerah yang tersangkut kasus korupsi. masih banyak kementerian/lembaga serta Pemerintah Daerah yang setelah dapat WTP merasa itu sudah cukup. Predikat WTP bukanlah tujuan akhir dari laporan keuangan seharusnya itu dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kembali apa saja yang bisa dimaksimalkan lagi untuk efisiensi anggaran. Laporan keuangan itu harusnya dipakai sebagai alat untuk *feed back* membuat perencanaan yang lebih baik.

Keuangan pemerintah daerah dalam pengelolaannya dapat terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan, bisa disebabkan karena kurangnya pemahaman Standart Akuntansi Pemerintah (SAP) oleh pegawai pemerintahan. Pentingnya pemahaman SAP oleh pegawai pemerintahan khususnya dibagian keuangan bertujuan agar pengelolaan keuangan di Instansi pemerintahan berjalan dengan baik dan semestinya. Karena SAP dijadikan pedoman dalam penyusunan laporan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas.

Intellectual Capital merupakan suatu asset tidak terwujud dengan kemampuan memberi nilai kepada perusahaan dan masyarakat yang meliputi paten, hak atas kekayaan intelektual, hak cipta dan waralaba. menurut Shih dkk (2010) *Intellectual Capital* adalah pengetahuan, pengalaman, dan kemampuan karyawan, serta sumber-sumber pengetahuan yang tersimpan dalam database, system, alur kerja, budaya, dan filosofi manajemen dalam organisasi. Sedangkan menurut Kartika dan Hartane (2013), *Intellectual capital* adalah asset utama suatu perusahaan disamping asset fisik dan financial dibutuhkan kemampuan yang handal dari *intellectual capital* sendiri, disamping dalam menghasilkan suatu produk yang bernilai diperlukan kemampuan dan daya pikir dari karyawan, sekaligus bagaimana mengelola organisasi dan menjalin hubungan dengan pihak eksternal. Pemahaman sistem akuntansi juga diperlukan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas, sistem Akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian

rupa untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh manajemen guna memudahkan pengelolaan perusahaan. (Mulyadi, 2018:03)

dari definisi akuntansi tersebut, unsur suatu sistem akuntansi pokok adalah formulir, catatan yang terdiri dari jurnal, buku besar dan buku pembantu, serta laporan oleh karena itu sistem akuntansi menjadi suatu tuntutan sekaligus kebutuhan bagi tiap pemerintah daerah, adapun manfaat penerapan standart akuntansi pemerintah daerah (SPAD) berdasarkan standart akuntansi pemerintahan adalah bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas dan keandalan pengelola keuangan pemerintah melalui penyusunan dan pengembangan standart akuntansi pemerintah.

Menurut PP No.24 Tahun 2005 tentang standart Akuntansi Pemerintahan mendefinisikan Sistem Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagai serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi pemerintah. Selain sistem Akuntansi pengendalian Intern juga memiliki pengaruh terhadap informasi laporan keuangan pemerintah daerah berdasarkan peraturan pemerintah No 60 Tahun 2008 tentang pengendalian intern pemerintah, sistem pengendalian intern adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Dengan adanya sistem pengendalian intern tersebut diharapkan dapat menciptakan kondisi dimana terdapat budaya pengawasan terhadap seluruh organisasi dan kegiatan sehingga dapat mendeteksi terjadinya penyimpangan sejak dini serta meminimalisir terjadinya tindakan terjadinya tindakan yang dapat merugikan Negara. Untuk meyakinkan *stakeholders* maupun public tentang keakuratan dan keandalan laporan keuangan maka pemerintah membutuhkan pengendalian Intern yang optimal. Pemanfaatan teknologi Informasi juga mempengaruhi kualitas laporan keuangan dikarenakan pesatnya kemajuan teknologi Informasi saat ini dapat membuka peluang bagi berbagai pihak untuk mengakses dan mengelola informasi laporan keuangan daerah secara cepat dan akurat, secara umum manfaat yang

ditawarkan oleh suatu teknologi informasi antara lain kecepatan pemrosesan transaksi dan membantu penyajian laporan pema nfaatan teknologi akan meningkatkan kepatanwaktuan LKPD. (Widjajanto, 2001:89). Dalam penjelasan PP No. 56 Tahun 2005 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk mengembangkan dan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi untuk meningkatkan kemampuan mengelola keuangan daerah dan menyalurkan informasi keuangan daerah kepada pelayanan public. selanjutnya ada Komitmen Organisasi, Komitmen Organisasi juga berpengaruh dalam berkualitas atau tidaknya sebuah laporan keuangan karena Komitmen Organisasi adalah sikap atau bentuk perilaku seseorang terhadap organisasi dalam bentuk loyalitas dan pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi. Menurut Luthans (2006) Komitmen Organisasi adalah keinginan kuat untuk tetap sebagai anggota organisasi tertentu, keinginan untuk berusaha keras sesuai dengan keinginan organisasi dan keyakinan tertentu juga penerimaan nilai dan tujuan organisasi. Laporan keuangan adalah suatu cerminan untuk dapat mengetahui apakah suatu pemerintahan telah berjalan dengan baik, sehingga pemerintah diharuskan untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Menurut IAI (2012: 5) Laporan Keuangan merupakan struktur yang menyajikan posisi keuangan serta kinerja laporan keuangan dalam suatu entitas. Adapun tujuan umum yakni penyajian informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas dari entitas yang sangat berguna untuk membuat keputusan ekonomis bagi pengguna. Dalam penyusunan laporan keuangan diharapkan berpedoman dalam pada standar yang telah ditentukan. Dalam hal ini standart Akuntansi Pemerintahan. Dimana berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2010 standart Akuntansi pemerintahan merupakan pedoman di dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan.

Peneliti berdasarkan uraian latar belakang di atas, tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO”**

B. Rumusan Masalah

Penelitian telah mengemukakan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah pengaruh Intellectual Capital terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah pengaruh pemahaman standart akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
3. Apakah pengaruh system pengendalian Intern pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintahan daerah?
4. Apakah pengaruh pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?
5. Apakah pengaruh komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh Intellectual Capital terhadap kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah.
2. Untuk mengetahui dan menganalisa Pengaruh pemahaman standar akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa Pengaruh system pengendalian Intern pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.
4. Untuk mengetahui dan menganalisa pemanfaatan teknologi Informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah

daerah.

5. Untuk mengetahui dan menganalisa komitmen organisasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya:

1. Manfaat Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang factor-faktor yang mempengaruhi kualitas pemerintah daerah khususnya di Kabupaten Sukoharjo

2. Manfaat Bagi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai salah satu dasar dalam meningkatkan factor-faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Sukoharjo, yaitu factor Intellectual Capital, Pemahaman standart akuntansi pemerintahan, system pengendalian Intern pemerintahan, pemanfaatan teknologi informasi dan komitmen Organisasi, untuk dijadikan masukan dalam menentukan kebijakan operasional pemerintahan, terkait dengan perbaikan kualitas laporan keuangan pemerintah Daerah.

3. Manfaat Bagi Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan atau bisa juga dijadikan sebagai referensi untuk melakukan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Teori yang Relevan

1. Laporan Keuangan

a. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Warren dan Fees (2009:24) Laporan Keuangan adalah setelah transaksi dan diithisarkan, maka disiapkan bagi pemakai. Laporan akuntansi yang menghasilkan informasi demikian disebut laporan keuangan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan, pengertian laporan keuangan merupakan laporan terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan.

Menurut PSAK No 1 (2015:2) Laporan Keuangan merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi neraca, laporan Labarugi, laporan perubahan posisi keuangan (yang dapat disajikan dalam berbagai cara misalnya, sebagai laporan arus kas, atau laporan arus dana), catatan dan laporan lain serta materi penjelasan yang merupakan bagian integral dari laporan keuangan. Disamping itu juga termasuk skedul dari Informasi tambahan yang berkaitan dengan laporan tersebut.

b. Unsur-Unsur Dalam Laporan Keuangan Pemerintah

Berdasarkan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan, Laporan Keuangan Pemerintah terdiri dari:

1) Laporan Realisasi Anggaran

Laporan realisasi anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode.

- 2) Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
Laporan perubahan saldo anggaran menyajikan informasi kenaikan atau penurunan saldo anggaran lebih dari tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

- 3) Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas mengenai asset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu.

- 4) Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah dalam suatu periode pelaporan.

- 5) Laporan Arus Kas

Laporan Arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktifitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah pusat atau daerah periode tertentu.

- 6) Laporan perubahan Ekuitas

Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan pada tahun sebelumnya.

- 7) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan naratif atau rincian dari rangka yang tertera dalam laporan realitas anggaran, laporan perubahan SAL, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas.

c. Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan laporan keuangan bagi pihak internal berguna untuk penilaian kinerja, sedangkan bagi pihak eksternal berguna dalam proses pertimbangan keputusan ekonomi, social, budaya maupun politik. Menurut PSAK No 1 (2015:3) adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintahan, secara spesifik tujuan laporan keuangan pemerintah adalah menyajikan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan dan untuk menunjukan akuntabilitas entitas pelaporan atas dasar sumber daya dipercayakan kepadanya dengan:

- 1) Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pemerintah
- 2) Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas daya pemerintah.
- 3) Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- 4) Menyediakan mengenai ketaatan realisasi terhadap anggarannya.
- 5) Menyediakan informasi mengenai cara entitas pelaporan mendanai aktivitasnya dan memenuhi kebutuhan kasnya.

- 6) Menyediakan informasi mengenai potensi pemerintah untuk membiayai penyelenggaraan kegiatan pemerintah.
- 7) Menyediakan informasi yang berguna untuk mengevaluasi kemampuan entitas pelaporan dalam mendanai aktivitasnya.

d. Kualitas Laporan Keuangan

Definisi kualitas menurut Iman Mulyana (2010:96) adalah kualitas diartikan sebagai kesesuaian dengan standard, diukur berbasis kadar ketidaksesuaian, serta dicapai melalui pemeriksaan. Kualitas merupakan suatu penilaian terhadap output pusat pertanggungjawaban atas suatu hal, baik itu dilihat dari segi yang berwujud seperti barang maupun segi yang tidak berwujud, seperti suatu kegiatan. Pelaporan keuangan yang berkualitas adalah pelaporan keuangan yang menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi penggunaannya, yaitu informasi yang memenuhi karakteristik kualitatif informasi atau karakteristik informasi keuangan yang berkualitas (IPSAS, 2010). Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) disebutkan bahwa pengungkapan kebijakan akuntansi yang diterapkan akan membantu pembaca untuk dapat menghindari kesalahpahaman dalam membaca laporan keuangan. Pengungkapan kebijakan akuntansi dalam laporan keuangan dapat dimengerti. Tujuan pelaporan Keuangan menurut FASB (2010) adalah memberikan informasi keuangan atas entitas yang dilaporkan, yang bermanfaat bagi penggunaannya untuk pengambilan keputusan. Kegunaan informasi keuangan untuk pengambilan keputusan merupakan kualitas utama atau kualitas penentu untuk pelaporan keuangan yang berkualitas, artinya pelaporan keuangan yang berkualitas adalah yang menghasilkan informasi yang informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan.

Karakteristik Kualitatif laporan keuangan menurut Peraturan

Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah ukuran-ukuran normative yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normative yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

1) Relevan

Laporan Keuangan bisa dikatakan relevan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan serta menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Dengan demikian informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya informasi. Informasi yang relevan adalah :

a)Memiliki manfaat umpan balik (feedback value) Informasi

memungkinkan pengguna untuk menegaskan alat mengoreksi ekspektasi di masa lalu.

b)Memiliki manfaat prediksi (predictive value) Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.

c)Tepat waktu Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.

d)Lengkap.

2) Andal

Penggunaan informasi tersebut dapat dicegah

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka pengguna informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik sebagai berikut:

- a) Penyajian jujur informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan.
- b) Dapat diverifikasi Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak jauh beda.
- c) Netralitas Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3) Dapat Dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah akan menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4) Dapat Dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud.

Kualitas laporan keuangan daerah setiap tahunnya mendapatkan penilaian berupa opini dari Badan Pengawas Keuangan (BPK). Opini yang diberikan ada empat yaitu Opini Tidak Wajar (TP), Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dan Opini Tidak Memberi Pendapat (TMP). Pemberian opini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan yang bebas salah saji material.

2. *Intellectual Capital*

a. Definisi *Intellectual Capital*

Definisi *Intellectual Capital* yang ditemukan dalam beberapa literature cukup kompleks dan beragam. Secara umum *Intellectual Capital* yang selanjutnya akan disebut *IC* adalah Ilmu pengetahuan atau daya pikir, yang dimiliki oleh perusahaan, tidak memiliki bentuk fisik (tidak berwujud), dan dengan adanya modal *intellectual* tersebut, perusahaan akan mendapatkan tambahan keuntungan atau kemampuan proses usaha serta memberikan perusahaan suatu nilai lebih dibanding dengan competitor atau perusahaan lain (Ellanyndra, 2011). Menurut Stewart *Intellectual Capital* adalah materi *intellectual* pengetahuan, informasi, hak pemilikan *intellectual*, pengalaman yang dapat digunakan untuk menciptakan kekayaan. (Ulum, 2013:189) sedangkan menurut Pangestu (2010) *Intellectual Capital* mencakup semua pengetahuan karyawan, organisasi dan kemampuan mereka untuk menciptakan nilai tambah dan menyebabkan keunggulan kompetitif

berkelanjutan. Modal *Intellectual* telah di indentifikasi sebagai seperangkat tak berwujud (Sumber daya, kemampuan, dan kompetensi) yang menggerakkan kinerja organisasi dan penciptaan nilai.

Kartika dan Hartane (2013:17) menyimpulkan bahwa *Intellectual Capital* merupakan asset Utama suatu perusahaan disamping asset fisik dan financial. Maka dalam mengelola asset fisik dan finansial dibutuhkan kemampuan yang handal dari *Intellectual Capital* itu sendiri, disamping dalam menghasilkan suatu produk yang bernilai diperlukan kemampuan dan daya pikir dari karyawan, sekaligus bagaimana mengelola organisasi dan menjalin hubungan dengan pihak eksternal.

b. Komponen *Intellectual Capital*

Definisi-definisi tentang *Intellectual Capital* tersebut di atas kemudian telah mengarahkan beberapa peneliti untuk mengembangkan komponen spesifik atas *Intellectual Capital*, public mengklasifikasikan *Intellectual Capital* dalam nilai tambah (*Value Added*) yang didapatkan dari selisih pendapatan (*Input*) perusahaan dengan seluruh biaya (*Output*). Lebih lanjut lagi, nilai tambah *Intellectual Capital* dibagi menjadi *Capital Employed* (VACA), *Human Capital* (VAHU), dan *Struktural Capital* (STVA), ketiga kategori tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1) *Human Capital*

Human Capital merupakan kombinasi dari *knowledge*, *skill*, *innovativeness*, dan kemampuan individu dalam sebuah perusahaan. Menurut Baroroh (2013:174) *Human Capital* yang tinggi akan dapat mendorong peningkatan kinerja keuangan. *Human Capital* merupakan kombinasi dari pengetahuan, keterampilan, *inovasi*, dan kemampuan seseorang untuk menjalankan tugasnya sehingga dapat menciptakan suatu nilai. *Human Capital* dapat meningkat jika

perusahaan dapat mengembangkan pengetahuan, kompetensi, dan keterampilan karyawan secara efisien. Dengan memiliki karyawan yang memiliki keterampilan dan keahlian maka dapat meningkatkan kinerja suatu perusahaan.

2) *Struktural Capital*

Menurut Baroroh (2013:174) *Structural Capital* merupakan kemampuan organisasi meliputi infrastruktur, system informasi, rutinitas, prosedur dan budaya organisasi yang mendukung usaha karyawan untuk menghasilkan intelektual yang optimal. Suatu organisasi yang memiliki prosedur yang baik maka *Intellectual Capital* akan mencapai kinerja secara optimal. Struktural Capital menjadi Infrastruktur perusahaan yang membantu meningkatkan produktivitas karyawan, termasuk dalam hal database, organizational chart, process, manuals, strategis routines, dan segala hal yang membuat nilai perusahaan lebih besar dari materialnya.

3) *Relational Capital/Capital Employed*

Relational Capital merupakan hubungan yang *harmonis/association network* yang dimiliki oleh perusahaan dengan para mitranya, baik yang berasal dari para pemasok yang andal dan berkualitas, berasal dari pelanggan yang loyal dan merasa puas akan pelayanan perusahaan yang bersangkutan, berasal dari hubungan perusahaan dengan pemerintah maupun dengan masyarakat sekitar (Arifah da Medyawati, 2012). Pulic (1998) dalam Ulum (2013:191) menyebut modal intelektual ini sebagai *capital Employed*. Dimana modal *intellectual* ini menggambarkan modal yang dimiliki perusahaan berupa hubungan yang harmonis kepada para mitranya serta pengelolaan *physical capital* guna membantu penciptaan nilai tambah (*value added*) bagi perusahaan.

IFAC (1998) mengklasifikasikan *Intellectual Capital* dalam tiga kategori, yaitu *Organizational Capital*, *Relational Capital* dan *Human Capital*. *Organizational Capital* meliputi *Intellectual Property* dan *Infrastructure assets*.

Tabel 1 menyajikan Pengklasifikasian tersebut beserta komponen-komponennya.

Klasifikasi *Intellectual Capital*

<i>Organizational Capital</i>	<i>Relational Capital</i>	<i>Human Capital</i>
<i>Intellectual Property:</i> • <i>Patents</i> • <i>Copyrights</i> • <i>Design rights</i> • <i>Trade secret</i> • <i>Trademarks</i> • <i>Service marks</i> <i>Infrastructure Assets:</i> • <i>Management philosophy</i> • <i>Corporate culture</i> • <i>Management Process</i> • <i>Information systems</i> • <i>Networking systems</i> • <i>Financial relations</i>	• <i>Brands</i> • <i>Customers</i> • <i>Customer loyalty</i> • <i>Backlog orders</i> • <i>Company names</i> • <i>Distribution channels</i> • <i>Business collaborations</i> • <i>Licensing agreements</i> • <i>Favourable contracts</i> • <i>Franchising agreements</i>	• <i>Know-how</i> • <i>Education</i> • <i>Vocational qualification</i> • <i>Work-related knowledge</i> • <i>Work-related competencies</i> • <i>Entrepreneurial spirit, Innovationess proactive and reactive abilities, changeability</i> • <i>Psychometric valuation</i>

Sumber : IFAC, 1998 (Ulum, 2013:191)

c. Pengukuran *Intellectual Capital*

Intellectual Capital hingga saat ini belum disebutkan di laporan keuangan. Dikarenakan pengukuran terhadap *Intellectual Capital* belum ditemukan yang tepat dan objektif. Oleh karena itu Pulic (2000) dalam Ulum (2013:192) memperkenalkan pengukuran yang secara tidak langsung mengukur *Intellectual Capital* melalui nilai yang dimiliki. Metode *Value added intellectual coefficient (VAICTM)* dikembangkan oleh Pulic pada tahun 1997 yang didesain untuk menyajikan informasi tentang *value creation efficiency* dari asset berwujud (*tangible asset*) dan asset tidak berwujud (*intangible asset*) yang dimiliki perusahaan. *VAICTM* merupakan instrument untuk mengukur kinerja *intellectual capital* perusahaan. Pendekatan ini relative mudah dan sangat mungkin untuk dilakukan, karena dikonstruksi dari akun-akun dalam laporan keuangan perusahaan (neraca, laba rugi) (Ulum, 2013:192). Metode ini untuk mengukur seberapa dan bagaimana efisiensi *Intellectual capital* dan *Capital employed* dalam menciptakan nilai berdasarkan pada hubungan tiga komponen utama yaitu *Human Capital*, *Capital Employed* dan *Structural Capital*.

Model ini dimulai dengan kemampuan perusahaan untuk menciptakan *value added (VA)*. *Value added* adalah indikator paling objektif untuk menilai keberhasilan bisnis dan menunjukan kemampuan perusahaan dalam penciptaan nilai (*value creation*). *VA* dihitung sebagai selisih antara *output* dan *input*. *Output (OUT)* mempresentasikan *revenue* dan mencakup seluruh produk dan jasa yang dijual di pasar, sedangkan *input (IN)* mencakup seluruh beban yang digunakan dalam memperoleh *revenue*. Hal penting dalam model ini adalah bahwa beban karyawan (*labour expense*) tidak termasuk dalam *IN*. karena peran aktifnya dalam proses *value creation*, *intellectual potensial* (yang dipresentasikan dengan *labour expense*) tidak dihitung sebagai biaya (*cost*) dan tidak masuk dalam komponen *IN*. Karena itu aspek kunci dalam model Pulic adalah memperlakukan tenaga kerja sebagai entitas penciptaan nilai (*value creating entity*) (Ulum, 2013:192). Metode

ini memiliki 3 komponen utama yaitu sebagai berikut:

1) *Value Added Capital Employed (VACA)*

Value Added Capital employed adalah indikator untuk VA yang diciptakan oleh satu unit *physical capital*. Rasio ini menunjukkan kontribusi yang dibuat oleh setiap unit dari CE terhadap *value added organisasi* (Ulum, 2013: 193). *VACA* atau *value added* menggambarkan berapa banyak nilai tambah yang dihasilkan dari modal perusahaan yang digunakan.

2) *Value Added Human Capital (VAHU)*

Rasio ini menunjukkan hubungan antara VA dan HC (*Human Capital*), (*Value Added Human Capital (VAHU)*) menunjukkan berapa banyak VA dapat dihasilkan dengan dana yang dikeluarkan untuk tenaga kerja. Hubungan antara VA dan HC mengindikasikan kemampuan dari HC untuk menciptakan nilai di dalam perusahaan. Konsisten dengan pandangan penulis IC lainnya. Pulic beragumen bahwa *total salary and wages cost* adalah indikator dari HC perusahaan (Ulum, 2013:193).

3) *Structural Capital Value Added (STVA)*

Structural Capital Coefisient (STVA) menunjukkan kontribusi *structural capital (SC)* dalam peciptaan nilai. *STVA* mengukur jumlah SC yang dibutuhkan untuk menghasilkan 1 rupiah ari VA dan merupakan indikasi bagaimana keberhasilan SC dalam penciptaan nilai. SC bukanlah ukuran yang *independen* sebagaimana HC, ia independen terhadap *value creation*. Artinya, semakin besar kontribusi HC *value creation*, maka akan semakin kecil kontribusi SC dalam hal tersebut (Ulum,2013:193)

3. Pemahaman Standart Akuntansi Pemerintah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2010, Standar Akuntansi Pemerintah adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar ini digunakan dilingkup pemerintahan, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan satuan organisasi dilingkup pemerintahan, menurut peraturan perundang-undangan organisasi tersebut wajib menyajikan laporan keuangan. Standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual sudah diterapkan pada semua laporan keuangan pemerintahan di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual terdapat dua belas pernyataan SAP, pernyataan ini akan digunakan sebagai indikator dalam penelitian untuk mengukur pemahaman SAP pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo, pernyataan SAP tersebut yaitu:

a. PSAP Nomor 01 tentang Penyajian Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu berbasis akrual. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual baik dalam pengakuan pendapatan dan bebas maupun pengakuan asset, kewajiban dan ekuitas. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual, menyajikan laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran.

b. PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran

Tujuan pelaporan realisasi anggaran adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Dalam penyajian dan laporan realisasi anggaran disusun dan disajikan dengan menggunakan anggaran berbasis kas.

Laporan realisasi anggaran menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus atau defisit dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggaranya dalam satu periode. Akuntansi pendapatan LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

c. PSAP Nomor 03 tentang Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan non anggaran. Entitas pelaporan dapat menyajikan arus kas dari aktivitas operasi dengan menggunakan metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung adalah mengungkapkan pengelompokan utama penerimaan dan pengeluaran kas bruto. Metode tidak langsung adalah surplus/deficit disesuaikan dengan transaksi-transaksi operasional nonkas, penangguhan atau pengakuan penerimaan kas atau pembayaran yang lalu/ yang akan datang, serta unsur penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan pendanaan.

d. PSAP Nomor 04 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis, setiap pos dalam laporan realisasi anggaran, neraca, dan laporan arus kas harus mempunyai referensi silang dengan informasi terkait dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan laporan keuangan harus dapat membantu pembaca memahami realisasi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan, termasuk kebijakan fiskal/keuangan dan kondisi ekonomi makro.

e. PSAP Nomor 05 tentang Akuntansi Persediaan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah. Persediaan disajikan sebesar:

- 1) Biaya diperoleh apabila diperoleh dengan pembelian
- 2) Biaya standar apabila diperoleh dengan produksi sendiri
- 3) Nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi

f. PSAP Nomor 06 tentang Akuntansi Investasi

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran, sedangkan penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerima pembiayaan. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata.

g. PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap

Asset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian asset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai asset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan, Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan/donasi harus dicatat sebagai nilai wajar

pada saat perolehan. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh asset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakter asset tersebut.

h. PSAP Nomor 08 tentang Akuntansi Kontruksi Dalam Pekerjaan

Suatu benda berwujud diakui sebagai kontruksi dalam pengerjaan jika :

- 1) Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan asset tersebut akan diperoleh.
- 2) Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal
- 3) Asset tersebut masih dalam pengerjaan

Kontruksi dalam pengerjaan dipindahkan ke epos asset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut terpenuhi:

- 1) Kontruksi secara substansi telah selesai dikerjakan.
- 2) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan.

i. PSAP Nomor 09 tentang Akuntansi Kewajiban

Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan atau pada saat kewajiban timbul. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Penjabaran mata uang asing menggunakan kurs tengah Bank sentral pada saat tanggal neraca.

j. PSAP Nomor 10 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan

Operasi yang Tidak Dilanjutkan.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam dua jenis yaitu kesalahan yang tidak berulang dan kesalahan yang berulang dan sistematis. Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali, yang dikelompokkan dalam dua jenis yaitu kesalahan yang tidak berulang terjadi pada periode berjalan dan terjadi pada periode sebelumnya. Kesalahan berulang dan sistematis adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang.

Terhadap setiap kesalahan harus dilakukan koreksi segera setelah diketahui, suatu perubahan kebijakan akuntansi harus dilakukan hanya apabila penerapan suatu kebijakan akuntansi yang berbeda diwajibkan oleh peraturan perundang atau apabila diperkirakan bahwa perubahan tersebut akan menghasilkan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja laporan keuangan entitas. Perubahan kebijakan akuntansi dan pengaruhnya harus diungkapkan dalam pencatatan atas laporan keuangan.

k. PSAP Nomor 11 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian

Laporan keuangan konsolidasian terdiri dari laporan realisasi anggaran, laporan DSI, neraca, laporan operasi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan konsolidasian disajikan untuk periode pelaporan yang sama dengan periode pelaporan keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode keuangan entitas pelaporan dan berisi jumlah komparatif dengan periode sebelumnya.

l. PSAP Nomor 12 tentang Laporan Operasional

Laporan operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan LO, beban, surplus/deficit dari operasi, surplus/deficit dari kegiatan non operasi, surplus/deficit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa surplus/disfisit LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar secara komperatif. Laporan operasi dijelaskan lebih lanjut dalam catatan atas laporan keuangan yang memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun seperti kebijakan fiskal, dan moneter, serta daftar-daftar yang merinci lebih lanjut angka-angka yang dianggap perlu untuk dijelaskan.

4. Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan

a. Sistem Pengendalian Intern

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, system pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. System pengendalian intern masih mengandung kelemahan dan keterbatasan sehingga masih memungkinkan terjadinya pelanggaran dan kesalahan, karena sangat sulit untuk membangun system yang sempurna.

b. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

Menurut Peraturan Nomor 60 Tahun 2008, system pengendalian intern pemerintah adalah system pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. System pengendalian intern pemerintah dirancang untuk memberikan jaminan bahwa tujuan

organisasi dapat dicapai melalui efisiensi dan efektivitas operasi, reabilitas penyajian laporan keuangan yang dapat dipercaya dan ketaatan terhadap undang-undangan serta kebijakan yang berlaku . Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, tujuan system pengendalian intern pemerintahan adalah memberikan keyakinan yang memadai bagi terciptanya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Negara, keandalan laporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, system pengendalian intern pemerintahan terdiri atas lima unsur. Kelima unsur tersebut akan digunakan sebagai indicator penelitian ini untuk mengukur system pengendalian intern pemerintahan di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo. Berikut ini merupakan unsu-unsur tersebut:

1) Lingkungan Pengendalian

Lingkungan Pengendalian adalah kondisi dalam instansi pemerintah yang mempengaruhi efektivitas pengendalian intern. Pemimpin instansi pemerintah wajib menciptakan dan memelihara lingkungan pengendalian, sehingga dapat menimbulkan perilaku positif dan kondusif untuk penerapan system pengendalian intern dalam lingkungan kerjanya. Lingkungan pengendalian dapat diwujudkan melalui:

- a) Penegakan integritas dan nilai etika.
- b) Komitmen terhadap kompetensi.
- c) Kepemimpinan yang kondusif.
- d) Pembentukan struktur organisasi yang sesuai dengan kebutuhan.
- e) Pendeglasian wewenang dan tanggungjawab yang tepat.

- f) Penyusunan dan penerapan kebijakan yang sehat tentang pembinaan sumber daya manusia.
- g) Perwujudan peran pengawasan intern pemerintah yang efektif.
- h) Hubungan kerja yang baik dengan instansi pemerintah terkait.

2) Penilaian Resiko

Penilaian resiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan yang mengancam pencapaian tujuan dan saran instansi pemerintahan. Pemimpin instansi pemerintah wajib melakukan penilaian, yang terdiri atas:

- a. Identitas resiko menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan instansi pemerintah dan tujuan pada tingkat kegiatan secara komprehensif. Menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali resiko dari factor internal dan factor eksternal dan menilai factor yang lain yang dapat meningkatkan resiko.
- b. Analisis resiko dilaksanakan untuk menentukan dampak dari resiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian tujuan instansi pemerintah. Pemimpin instansi pemerintah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang terima.

Pemimpin instansi pemerintah dalam rangka penilaian resiko harus terlebih dahulu menentukan tujuan instansi pemerintah dan kegiatan. Tujuan tersebut memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realitis dan terikat waktu dan wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.

3) Kegiatan Pengendalian

Kegiatan pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif. Pemimpin instansi pemerintah wajib menyelenggarakan kegiatan pengendalian sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi instansi pemerintah yang bersangkutan. Karakteristik kegiatan pengendalian yaitu :

- a) Kegiatan pengendalian diutamakan pada kegiatan pokok instansi.
- b) Kegiatan pengendalian harus dikaitkan dengan proses penilaian risiko.
- c) Kegiatan pengendalian yang dipilih disesuaikan dengan sifat khusus instansi pemerintah.
- d) Kebijakan dan prosedur harus ditetapkan secara tertulis.
- e) Prosedur yang telah ditetapkan harus dilaksanakan sesuai dengan yang ditetapkan secara tertulis.
- f) Kegiatan pengendalian dievaluasi secara teratur untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut masih sesuai dan berfungsi seperti yang diharapkan.

4) Informasi dan Komunikasi

Informasi adalah data yang telah diolah yang dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah. Komunikasi merupakan proses penyampaian pesan atau informasi dengan menggunakan symbol atau lambing tertentu baik secara langsung maupun tidak langsung untuk

mendapatka umpan balik. Dalam hal ini pemimpin instansi pemerintah wajib mengidentifikasi, mencatat dan mengkomunikasi informasi dalam bentuk dan waktu yang tepat. Berkaitan dengan pengomunikasian informasi, wajib diselenggarakan secara efektif, dengan cara sebagai berikut:

- a) Menyediakan dan memanfaatkan berbagai bentuk dan sarana komunikasi.
- b) Mengelola, mengembangkan dan memperbarui system informasi secara terus menerus.

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

1. Pengertian Teknologi Informasi

Teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data. Pengolahan itu termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu (Hamzah, 2011). Menurut Sutabri (2014) teknologi Informasi adalah suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi, data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintah dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi informasi adalah sarana dan prasarana (Hardware, Software, Ueware) system dan metode untuk memperoleh, mengirim, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan dan menggunakan data secara

bermakna (Warsita, 2012)

2. Tujuan Teknologi Informasi

Tujuan Teknologi Informasi adalah untuk memecahkan suatu masalah, membuka kreativitas, meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam melakukan pekerjaan. Jadi dapat dikatakan karena dibutuhkannya pemecahan masalah, membuka kreativitas dan efisiensi manusia dalam melakukan pekerjaan, menjadi penyebab atau acuan diciptakannya teknologi informasi. Dengan adanya teknologi informasi membuat pekerjaan manusia menjadi lebih mudah dan efisien (Warsita, 2012)

3. Fungsi Teknologi Informasi

Terdapat enam fungsi teknologi informasi (Warsita, 2012), yaitu:

a) Sebagai penangkap (Capture)

Suatu Proses Penangkapan data yang akan menjadi masukan.

b) Sebagai Pengolah (Processing)

Mengolah atau memproses data masukan yang diterima untuk menjadi informasi. Pengolahan atau pemrosesan data dapat berupa konversi (pengubah data bentuk lain), analisis (analisa kondisi), perhitungan (kalkulasi), sintesis (penggabungan) segala bentuk data dan informasi.

c) Sebagai Menghasilkan (Generating)

Menghasilkan atau mengorganisasikan informasi ke dalam bentuk, misalnya laporan, table, grafik dan sebagainya.

d) Sebagai Penyimpanan (Storage)

Merekam atau menyimpan data dan informasi dalam suatu media yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya.

e) Sebagai Pencari Kembali (Retrival)

Menelusuri, mendapatkan kembali informasi atau menyalin data dan informasi yang sudah tersimpan.

f) Sebagai Transmisi (Transmission)

Mengirim data dan informasi dari suatu lokasi ke lokasi lain melalui jaringan computer.

6. Komitmen Organisasi

a. Definisi Komitmen Organisasi

Komitmen Organisasi merupakan salah satu topic yang akan selalu menjadi tinjauan baik bagi pihak manajemen dalam sebuah organisasi maupun bagi pihak para peneliti yang khususnya berfokus pada perilaku manusia. Komitmen organisasional menjadi pentingnya khususnya bagi organisasi yang ada saat ini dikarenakan dengan melihat sejauh mana keberpihakan seorang karyawan terhadap organisasi, dan sejauh mana karyawan tersebut berniat untuk memelihara keanggotaannya terhadap organisasi maka dapat diukur pula sebaik apa komitmen seorang karyawan terhadap organisasinya. (Ria Mardiana Yusuf, Darman Syarif, 2018: 25). Menurut Moorhead dan Griifin (2013) dalam (Ria, Darman, 2018:31) Komitmen Organisasi adalah identifikasi dan ikatan seseorang pada organisasi.

Seseorang yang sangat berkomitmen, akan melihat dirinya sebagai anggota sejati perusahaan, mengabaikan minimnya ketidakpuasan, dan melihat dirinya sebagai anggota organisasi. Sebaliknya, orang yang kurang berkomitmen lebih cenderung melihat dirinya sebagai orang luar, lebih mengekspresikan ketidakpuasan, dan tidak melihat dirinya sebagai anggota organisasi dalam jangka waktu yang panjang. Sedangkan menurut Salancak Armstrong (2006) dalam (Ria, Darman, 2018:32) Komitmen Organisasi adalah suatu keadaan mana seorang individu

menjadi terikat olehnya melalui tindakan dengan keyakinan sehingga ia bertahan untuk beraktifitas dan terlibat didalamnya. Ia bertahan untuk beraktifitas dan terlibat didalamnya. Tiga fitur dari perilaku yang penting dalam mengikat individu untuk tindakan mereka yaitu : visibilitas tindakan, sampai sejauh mana hasil yang tidak dapat dibatalkan, dan sejauh mana orang tersebut melakukan tindakan secara sukarela. Komitmen dapat ditingkatkan dan dimanfaatkan untuk mendapatkan dukungan dengan tujuan dan kepentingan organisasi melalui cara-cara seperti partisipasi dalam pengambilan keputusan.

b. Dimensi Komitmen Organisasi

Tiga dimensi komitmen organisasional menurut Robbins dan Judge (2015) dalam (Ria, Darman, 2018:37) adalah:

- 1) Komitmen afektif (Affective commitment) adalah perasaan emosional untuk organisasi dan keyakinan dalam nilai-nilainya.
- 2) Komitmen kontinyu (Continuance commitment) adalah nilai ekonomi yang dirasa dari bertahan dalam suatu organisasi bila dibandingkan dengan meninggalkan organisasi tersebut. Seorang karyawan mungkin berkomitmen kepada seorang pemberi kerja karena dibayar tinggi dan merasa bahwa pengunduran diri dari perusahaan akan menghancurkan keluarganya.
- 3) Komitmen normative (Normative communitie) adalah kewajiban untuk bertahan dalam organisasi untuk alasan-alasan moral atau etis. Seseorang akan bertahan dengan seorang pemberi kerja karena ia merasa meninggalkan seseorang dalam keadaan yang sulit apabila ia pergi.

c. Konsep Komitmen Organisasi

Konsep komitmen organisasi telah menjadi isu penelitian di

banyak negara dalam 60 tahun terakhir. Konsep ini diperkenalkan oleh Whyte pada kisaran tahun 1956. Berakar pada paradigma teori pertukaran social (Social Exchange Theory/SET) dalam memahami perilaku organisasi penelahaan teori tersebut sudah berlangsung sejak tahun 1920-an (Cropanzano dan Mitchel, 2005). Teori sebut meyakini bahwa pertukaran social merupakan eraksi yang berkelanjutan yang menciptakan kewajiban merson, 1976) dan saling bergantung antar pihak berinteraksi (Blau, 1964). Pada awalnya, konsep komitmen organisasi berfokus pada konsep komitmen itu sendiri, didasarkan pada pendekatan sikap, yang menunjukan pada permasalahan dan loyalitas (Porter, Streers, Mowday, & Boulian, 1974). Menurut (Porter et.al, 1974) pendekatan sikap mengaku pada keterikatan psikolog atau komitmen efektif yang dibentuk oleh seorang karyawan dalam hubungannya dengan permasalahan dan loyalitasnya dengan organisasi. Sedangkan menurut Steers dan Porter (1983) menjelaskan bahwa komitmen sebagai “loyalitas terhadap organisasi”. Ditandai dengan niat untuk tetap berada didalamnya, melakukan identifikasi dengan nilai-nilai dan tujuan organisasi. Tak kalah pentingnya adalah kemauan untuk menggunakan tenaga extra atas nama organisasi. Individu mempertimbangkan sejauh mana nilai-nilai dan tujuan mereka berhubungan dengan organisasi sebagai bagian dari komitmen organisasi, oleh karena itu dianggap sebagai hubungan diantara setiap karyawan dan organisasi. (Ria Mardiana Yusuf, Darman Syarif, 2018: 15)

d. Aspek-Aspek Komitmen Afektif

Allen & Meyer (1984, dalam Kushariyanti, 2007) menjelaskan ada tiga aspek yang menggambarkan kelekatan komitmen afektif karyawan terhadap organisasi yaitu :

- 1) Kepercayaan dan penerimaan terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi (identifikasi). Keyakinan dan penerimaan terhadap tujuan dan nilai-nilai organisasi. Merupakan kunci utama

terbentuknya serangkaian aspek komitmen organisasi yang lain. Aspek tersebut tercermin dalam beberapa sikap, antara lain : adanya kesamaan antara tujuan dan nilai pribadi dengan tujuan dan nilai organisasi, penerimaan individu terhadap kebijakan-kebijakan organisasi, dan adanya kebanggaan menjadi dari organisasi.

- 2) Keinginan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh dalam kepentingan organisasi (partisipasi). Keinginan untuk berusaha dengan sungguh-sungguh dalam kepentingan organisasi tercermin dalam usaha individu untuk menerima dan melaksanakan setiap tugas-tugas dan kewajiban yang dibebankan kepadanya. Individu bukan hanya sekedar melaksanakan pekerjaan di luar tugas dan perannya apabila bantuannya dibutuhkan organisasi.
- 3) Keinginan yang kuat untuk mempertahankan keanggotaannya dalam organisasi (loyalitas). Individu dengan komitmen tinggi akan mempunyai loyalitas dan rasa memiliki terhadap organisasi. Individu hanya mempunyai sedikit alasan untuk keluar dari organisasi yang diikutinya. Keinginan untuk mempertahankan keanggotaan pada organisasi ini mencerminkan sikap loyalitas atau kesetiaan terhadap organisasi. Loyalitas juga tercermin dalam afeksi yang positif terhadap organisasi serta adanya rasa memiliki terhadap organisasi.

e. Faktor penyebab (Antesden) Komitmen Afektif

Menurut Allen dan Meyer (1990, dalam Chairy, 2002) anteseden komitmen afektif terdiri dari karakteristik pribadi, karakteristik jabatan, pengalaman kerja, kehadiran serikat kerja, luasnya control, dan sentralisasi otoritas, berdasarkan pada beberapa anteseden tersebut, hanya pengalaman kerja yang merupakan anteseden yang paling berpengaruh, terutama pengalaman atas kebutuhan psikologis untuk merasa nyaman dalam

organisasi dan kompeten dalam menjalankan peran kerja.

1) Komitmen Normatif

Komitmen Normatif merupakan perasaan karyawan tentang kewajiban yang harus diberikan kepada organisasional. Komponen normative berkembang sebagai hasil dari pengalaman sosialisasi, tergantung dari sejauh apa perasaan kewajiban yang dimiliki karyawan.

Kesetiaan yang harus diberikan karena pengaruh orang lain Komitmen yang terjadi apabila karyawan terus bekerja untuk organisasi disebabkan oleh tekanan dari pihak untuk terus bekerja dalam organisasi tersebut. Karyawan yang mempunyai tahap komitmen normative yang tinggi sangat mementingkan pandangan orang lain terhadap dirinya jika karyawan meninggalkan organisasi.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting dalam rangka penyusunan penelitian, karena digunakan untuk melihat hasil penelitian terdahulu yang telah membahas variable yang sama dengan sebelumnya. Beberapa penelitian terdahulu yang akan digunakan dalam penelitian ini tampak pada table dibawah ini:

Tabel 2 Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul	Variabel X	Variabel Y	Alat Analisis	Hasil
1	Andriyani, I., Mikial, M., Marzuki, A., Azrin, A. (2022).	Pengaruh Intellectual Capital Dan Corpote Govenance Terhadap Kinerja Keuangan	X1: <i>Intelectual Capital</i> X2: Prorposisi Komisaris Independen X3:Kepemilik	Kinerja Keuangan Perbankan yang terdaftar di BEI	uji realibilitas, uji homogenitas, uji linearitas, uji asumsi klasik tang	menunjukkan bahwa intellectual capital berpengaruh positif terhadap kinerja perusahaan di masa depan, proporsi komisaris independen tidak berpengaruh

		Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI.	an Proposional		meliputi uji multikolonieritas dan uji heteroskedastisitas, uji regresi berganda dan analisis korelasi.	terhadap kinerja perusahaan di masa depan, dan kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan di masa depan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa intellectual capital dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan jika perusahaan dapat mengukurnya secara akurat namun corporate governance masih tidak terbukti dapat meningkatkan kinerja keuangan perusahaan..
2	Vidya Vitta Adhivinna, Ariyanti Nurul Hikmahwati,	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada OPD Kabupaten Gunungkidul)	X1: kompetensi SDM X2 : pemanfaatan TI X3: sistem pengendalian intern pemerintah V4: sistem akuntansi keuangan daerah	Kualitas Informasi Laporan Keuangan pemerintah daerah	Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Normalitas, Uji Multikolinieritas, Uji F, Uji Heteroskedastisitas, dan Uji t.	Hasil penelitian menunjukkan secara parsial, kompetensi SDM, pemanfaatan TI dan SPIP tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas informasi LKPD, sementara SAKD berpengaruh terhadap kualitas informasi LKPD. Secara simultan, kompetensi SDM, pemanfaatan TI, SPIP, dan SAKD memiliki pengaruh

						terhadap kualitas informasi LKPD.
3	Dina Sulastri, Abu 'Ala Abdullah, Khairil Fathir, Casilam, Very Muldani (2020)	Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada BKD Kota Depok)	X1 : Kompetensi sumber daya manusia X2 : Sistem Pengendalian Intern	Kualitas Informasi Laporan Keuangan	Uji Validitas, Uji Reliabilitas, Uji Regresi Linear Berganda, Uji Multikolinieritas, Uji Heteroskedastisitas, Uji F, Uji t	hasil penelitian ini menunjukkan kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah, Sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan terhadap kualitas Informasi Laporan keuangan Pemerintah daerah dan kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian intern berpengaruh secara simultan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.
4	Siti Qomah (2021)	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	X1: Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan X2: Sistem Pengendalian Internal X3: Kompetensi Sumber Daya Manusia X4: Pemanfaatan Teknologi Informasi	Kualitas Laporan Keuangan	Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji F, Uji R ² , Uji Validitas, Uji Reliabilitas	variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan, dan sistem pengendalian internal memberikan pengaruh secara signifikan pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Boyolali. Sehingga kualitas laporan keuangan yang baik disebabkan adanya pengetahuan yang tinggi pula terhadap SAP dan dipengaruhi oleh pengendalian internal dalam perusahaan atau pemerintahan guna menunjang kemajuan visi misi perusahaan

						oleh para pegawai. Sedangkan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan.
5	Rivaldy Manimpurung, Linjte Kalangi, Natalia Gerungai (2018)	Pengaruh Sumber daya Manusia dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset daerah (BPKAP) kota Manado	X1: Kapasitas SDM X2:Komitmen Organisasi	Kualitas Laporan Keuangan	Uji normalitas, Uji multikolinieritas, Uji Validitas, Uji Multikolonieritas, Uji Heterokedastitas, Uji Hipotesis	Hasil penelitian membuktikan bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh terhadap pengelolaan barang milik daerah dan kualitas laporan keuangan, sedangkan pemanfaatan teknologi Kapasitas Sumber Daya Manusia tidak berpengaruh secara parsial kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota manado di BPKAD. Hal ini ditunjukkan nilai t hitung lebih kecil daripada nilai t tabel ($1100 < 2.000$) dan nilai signifikansi yang lebih besar daripada nilai signifikansi 5% ($0.176 > 0.05$). Dan variabel komitmen organisasi berpengaruh secara parsial kualitas laporan keuangan pemerintah daerah kota manado di BPKAD. Hal ini ditunjukkan nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel ($0.2940 > 2.000$) dan nilai signifikansi yang lebih kecil daripada

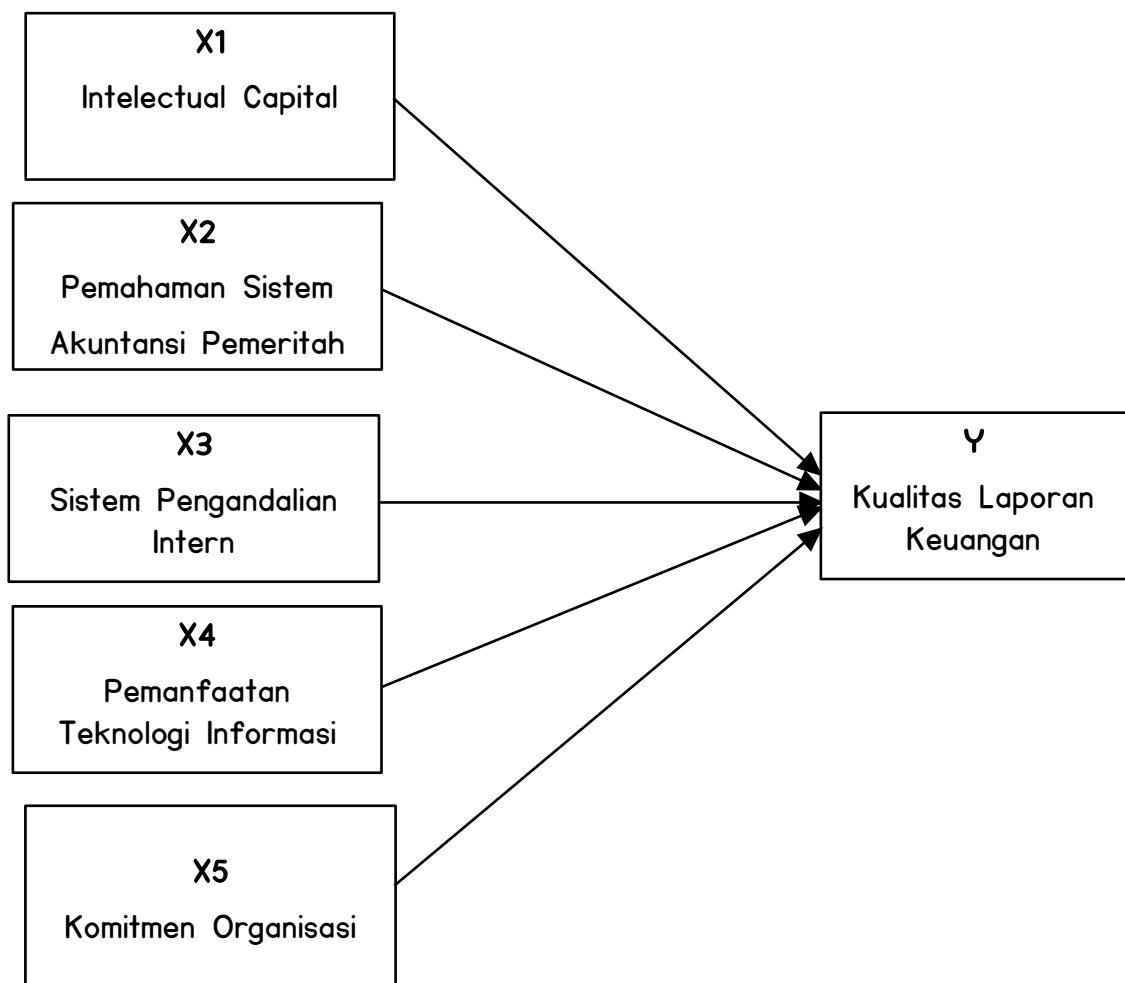
						nilai signifikansi 5% (0.005)
6	Hamdani Arifulsyah, Suci Nurulita (2020)	Pengaruh Intellectual Capital terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Perkebunan	X1: Intellectual Capital X2: Ukuran Perusahaan	Kinerja Perusahaan	Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Hipotesis	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Intellectual Capital tidak bisa menjadi faktor determinan terhadap kinerja keuangan perusahaan perkebunan yang diteliti. Secara parsial, ukuran perusahaan dapat menjadi faktor determinan yang signifikan terhadap kinerja keuangan yang diteliti, tapi tidak dapat memoderasi hubungan antara Intellectual Capital dengan kinerja keuangan perusahaan.
7	Aditya Sanjaya (2017)	Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem pengendalian Intern, Sistem Akuntansi keuangan daerah dan Sumber daya Manusia terhadap Kualitas laporan keuangan Keuangan pemerintahan daerah dengan komitmen organisasi	X1: Sistem Akuntansi Keuangan Daerah X2: Sumber Daya Manusia X3: Komitmen Organisasi	Kualitas Laporan Keuangan	Uji Normalitas, Uji Hipotesis, Uji Autokorelasi, Uji Regresi Linier Berganda, Uji t, Uji F, Uji Heteroskedastisitas	Hasilnya menunjukkan bahwa sistem akuntansi pemerintah, sistem pengendalian internal, sistem akuntansi pengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan ke tingkat signifikansi < 0.05 . Sementara hasil sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pada tingkat signifikansi $> 0,05$. Koefisien analisis regresi penentuan (R^2) dari 0.976 atau 97,6% yang berarti bahwa variabel

		sebagai pemoderasi				independen dalam penelitian ini dapat mempengaruhi variabel dependen, sementara sisanya 2,4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam penelitian ini.
--	--	--------------------	--	--	--	--

C. Kerangka Pikir

Kerangka pikir untuk dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan penelitian.

Tinjauan pusaka dan tinjauan penelitian terdahulu telah dikemukakan sebelumnya, maka variable yang terkait dalam penelitian ini dapat dirumuskan melalui kerangka pikir sebagai table berikut ini:



Gambar 1. Kerangka Pikir

Keterangan:

1. Variabel *Independen* (Variabel Bebas)

Variabel *independen* merupakan variable yang mempengaruhi variable terikat. Variabel *independen* dalam penelitian ini adalah *Intellectual Capital* (IC) (X1), Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintah (X2), Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (X3), Pemanfaatan Teknologi Informasi (X4), Komitmen Organisasi (X5).

2. Variabel *Dependen* (Variabel Terikat)

Variabel *Dependen* adalah Variabel yang dipengaruhi oleh variable lainnya. Variable *Dependen* dalam penelitian ini adalah Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y).

D. Hipotesis

Menurut Martono (2010) hipotesis dapat didefinisikan sebagai jawaban sementara yang kebenarannya harus diuji atau rangkuman kesimpulan secara teoritis yang diperoleh melalui tinjauan pustaka. Berdasarkan rumusan masalah, penelitian terdahulu, dan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti menyusun hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. Pengaruh *Intellectual Capital* (IC)

Intellectual capital adalah kemampuan, keterampilan, keahlian, dan bentuk pengetahuan yang berguna dalam organisasi sebagai keunggulan kompetitif bagi perusahaan sehingga dapat bersaing dan bertahan dipasar dan meningkatkan kekayaan perusahaan.

Jika perusahaan bisa memanfaatkan *intellectual capital* yang dimilikinya maka perusahaan itu akan lebih unggul dibanding perusahaan lain. Hal ini didukung oleh *resource based theory* yang menjelaskan tentang perusahaan yang dapat mengelola sumber dayanya dengan baik akan memiliki keunggulan bersaing sehingga bisa menciptakan nilai untuk perusahaannya. Oleh karenanya kinerja keuangan perusahaan selain dipengaruhi aset fisik perusahaan juga dipengaruhi aset tidak berwujud seperti kemampuan karyawan, infrastruktur yang memadai, teknologi yang canggih, hubungan dengan pemasok dan pelanggan yang baik, nama baik perusahaan, dan kemampuan untuk melakukan inovasi-inovasi dalam produknya (Ismail Solihin, 2012:51). Semua komponen-komponen yang mempengaruhi kinerja keuangan tersebut merupakan bagian dari *intellectual capital*. Sehingga jika perusahaan dapat mengelola dan memanfaatkan *intellectual capital*nya dengan baik maka kinerja keuangannya juga akan baik. Hubungan *intellectual capital* dengan kinerja keuangan perusahaan telah dibuktikan secara empiris oleh beberapa peneliti dalam berbagai pendekatan.

Penelitian Ima Andriyani, Msy. Mikial, Agustina Marzuki, Amrillah Azrin (2022) menunjukkan bahwa *intellectual capital* berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Sehingga hipotesis yang menyatakan bahwa variabel *intellectual capital* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan dapat diterima sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Firmanudin, Sudrajat dan Vina Citra Mulyandani (2021) *intellectual capital* yang ada pada pegawai maka produktivitas kerja pegawai dapat meningkat.

H1: *Intellectual Capital* berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan

2. Pemahaman system Akuntansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar

Akuntansi Pemerintahan , menerapkan bahwa Penerapan SAP. Berbasis AkruaI pada Pemerintah Pusat/Daerah terhitung mulai tahun 2012. Penerapan SAP dibutuhkan dalam rangka penyusunan APBN/APBK berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Mulai Tahun 2015 Instansi Pemerintah harus menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yaitu berbasis akrual. Laporan Keuangan yang sesuai dengan Standar Akuntansi yang berbasis akrual membutuhkan sistem akuntansi Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dibutuhkan dalam mengelola informasi akuntansi. Hal ini disebabkan karena pada dasarnya Sistem Akuntansi Keuangan Daerah mampu memberikan *output* data berupa laporan keuangan pemerintah daerah.

Penelitian ini dilakukan oleh Putriasri Pujanira dan Abdullah Taman (2017) menunjukan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif terhadap Kualitas Laporan Keuangan sedangkan penelitian yang dilakukan Desmaria Puji Kesuma, Choirul Anwar, Darmansyah (2017) Standar Akuntansi Pemerintah tidak berpengaruh signifikan terhadap Laporan Keuangan

H2: Pemahaman Standart Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

3. Sistem pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern (SPI) menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 adalah proses yang integritas pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan

organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan asset Negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

unsur-unsur sistem pengendalian intern pemerintah berdasarkan PP No 60 Tahun 2008 (BPKP), adalah sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian
2. Penilaian Resiko
3. Kegiatan pengendalian
4. Informasi dan komunikasi
5. Pemantauan pengendalian intern

Penelitian yang dilakukan oleh Gyshella Smylie Lumintang, Linda Lambey, Steven J. Tangkuman (2017) sistem pengendalian intern berpengaruh signifikan positif terhadap laporan keuangan pemerintah daerah Kota Manado, artinya bahwa semakin baik pelaksanaan unsur SPI maka semakin baik pula kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan dan penelitian yang dilakukan oleh Muhamad Nur Ihwan, Tri Widyastuti, Widarto Rachbini (2018) pengendalian intern akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pada Satuan Kerja Vertikal Kementerian Kesehatan Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

H3: Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

4. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Ketika komputer dan komponen-komponen yang berhubungan dengan teknologi informasi diintegrasikan ke dalam sistem akuntansi keuangan, tidak ada kegiatan umumnya yang ditingkatkan atau dikurangkan. Sistem informasi akuntansi tetap mengumpulkan, memproses dan menyimpan data dan setiap

proses akuntansi ini dapat mengurangi penggunaan kertas. Sistem informasi juga mengontrol keakuratan. Dan hal terpenting segala tahapan proses akuntansi dapat dilakukan secara otomatis. Di dukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mildamayanti , Muntu Abdullah dan Mulyati Akib (2018), serta juga penelitian oleh Melati Ramadhani, Ayu Noorida Soerono, Windu Mulyasari (2018) menunjukan bahwa pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Dina Sulastri, Abu 'Ala Abdullah, Khairi IFathir, Casilam, Ver; y Muldani (2022) Sistem pengendalian Intern Berpengaruh Positif

H4: Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

5. Komitmen Organisasi

Komitmen organisasional dibangun atas dasar kepercayaan pekerja atas nilai-nilai organisasi, kerelaan pekerja membantu mewujudkan tujuan organisasi dan loyalitas untuk tetap menjadi anggota organisasi. Penelitian yang dilakukan oleh Liza Mutiana, Yossi Diantimala, Zuraida (2017) Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan satker di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Aceh Utara sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Widatul Aziyah, Heri Yanto (2022) komitmen organisasi tidak memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

H5: Komitmen Organisasi berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

BAB III

OBJEK DAN METODE PENELITIAN

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pembahasan dan analisis data yang telah saya lakukan mengenai Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Laporan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo, adalah sebagai berikut:

1. *Intellectual Capital* berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
2. Pemahaman Sistem Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
3. Sistem Pengendalian Intern pemerintahan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
4. Pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan
5. Komitmen Organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan keuangan

B. Saran

Peneliti memberikan beberapa saran berdasarkan kumpulan yang telah didapatkan dalam penelitian, diantaranya:

1. Peran aktif PPID Pembantu agar ditingkatkan pelayanan informasi public dapat terlaksana dengan baik.
2. Instansi Pemerintah sebaiknya memanfaatkan secara optimal teknologi informasi (jaringan internet, hardware dan software/aplikasi) sehingga dapat meningkatkan efektifitas dalam menjalankan pekerjaan.

3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambahkan variable *independen* lain yang dapat memberikan pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan selain variable *independen* yang telah digunakan agar lebih memperkuat hasil penelitian.
4. Penelitian selanjutnya sebaiknya dilakukan dua kabupaten sehingga sampel yang didapatkan lebih banyak dan hasil yang didapatkan lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Wibisono, Edwin dan Rosinta Ria Panganbean, (2019), Pengaruh CSR dan Intellectual Capital terhadap Kinerja Keuangan, *Jurnal Akuntansi, Auditing dan Keuangan Vol.16 No.1 Maret 2019 : 62-92*

Indrawati, Lili dan Etti Sembiring, (2019). Pengaruh Intellectual Capital terhadap Produktivitas Kerja Pegawai di Pemerintah Daerah. *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akutansi, Vol. 11, 2 November 2019, Hal. 223-230*

Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Dipenogoro

Mulyadi, (2018). *Akuntansi Biaya*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN

Sugiyono, (2017). *Metode Penelitian Bisnis (pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi dan R&D)*. Bandung: Alfabeta

Sutarman, (2009). *Pengantar Teknologi Informasi*. Jakarta: Pt Bumi Aksara.

Sutabri, T. (2014). *Pengantar Teknologi Informasi*. Yogyakarta: Andi

Martono, N. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Rajawali Pers

Nurtantiono, A, (2019). *Analisis Regresi Kasus dan Analisis dengan SPSS*. Surakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surakarta.

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standart Akuntansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Ikatan Akuntansi Indonesia (2012), Standart Akuntansi Keuangan. Jakarta : Salemba Empat

Imam Mulyana. (2010). *Sumber Daya Manusia*. Edisi Kedua. Jakarta : Salemba Empat

Baroroh. N. (2013). *Analisis Pengaruh Model Intellectual terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Manufaktur di Indonesia*. Jurnal Dinamika Akuntansi 5 (2) : 172–182

Darman Syarif, (2018), *Komitmen Organisasi*, Makassar

Robbins, P. Stephen; Judge A. Timothy, 2015. *Perilaku Organisasi*. Edisi 16. Jakarta: Salemba Empat

Ellnyndra, M.P. 2011. Pengaruh Intellectual Capital terhadap Business Performance pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. *Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas dipenogoro, Semarang*.

Adhivina, Vidya, Vitta dan Ariyanti Nurul Hikmahwat, (2012). Faktor-Faktor yang mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan pada OPD Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Akuntansi & Manajemen Akmenika Vol. 17 No 1 Tahun 2020*

Ihwan, Nur, Muhammad., Tri Widyastuti., Widarto Rachibini. (2018). Pengaruh Kompetensi, Pengendalian Intern Akuntansi, Teknologi Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Studi pada Satker Vertikal Kementerian Kesehatan Wil Prov. DKI Jakarta. *Jurnal AKRAB JUARA Volume 3 Nomor 3 Edisi Agustus 2018 (24-41)*

Ramadhani, Melati., Ayu Noorida Soerono., Windu Mulyastuti (2018). Pengaruh Kompetensi Pengendalian Intern, Teknologi Informasi, dan Pemahaman Basis AkruaL Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Organisasi Perangkat Daerah Banten). *JURNAL RISET AKUNTANSI TERPADU Vol.12.1, 2018 Hal. 40-63*

Pura, Rahman (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Volume 18 Nomor 1 April 2021 Hal. 1-13*

Qomah., Siti (2021). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Akuntansi Trisakti Volume.8 Nomor.1 Februari 2021: 95-108*

Manipuring, Rivaldy., Lintje Kalangi dan Natalia Gerungai (2018). Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia terhadap Kualtias Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Negara Kota Manado. *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13 (2), 2018, 241-250*

Mildayanti., Muntu Abdullah dan Multayi Akib (2018). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern, Penerapan Standart Akuntansi Pemerintahan dan Pemanfaatan Informasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan (JPEP) Volume 3, No.2. Agustus 2018*

LAMPIRAN

Identitas Responden

No	Jabatan	Jumlah Pegawai
1	Kepala Badan Keuangan Daerah	1
2	Sekretaris	1
3	Kasubbag Umum dan Kepegawain	1
4	Kasubbag Perencanaan dan Keuangan	1
5	Kepala Bidang Anggaran	1
6	Kasubbid Perencanaan Anggaran	1
7	Kasubbid Penyusun Anggaran	1
8	Kasubbid Pelaksanaan Anggaran	1
9	Kepala Bidang Pendapatan	1
10	Kasubbid Pendaftaran dan Pendataan	1
11	Kasubbid Penetapan	1
12	Kasubbid Penerimaan, Penagihan dan Pelaporan	1
13	Kepala Bidang Pendaharaan	1
14	Kasubbid Belanja Langsung	1
15	Kasubbid Belanja Tidak Langsung	1
16	Kasubbid Pengendalian Kas	1
17	Kepala Bidang Aset Daerah	1
18	Kasubbid Penatausahaan Aset Daerah	1
19	Kasubbid Pendaaygunaan Aset Daerah	1
20	Kasubbid Perubahan Status Hukum dan Pengamanan Aset Daerah	1

21	Kepala Bidang Akuntansi dan Pelaporan	1
22	Kasubbid Pembukuan dan Akuntansi	1
23	Kasubbid Verifikasi	1
24	Kasi Fasilitas Penyusunan Laporan Keuangan	
25	Staf	31
	total	55